



LAPORAN KINERJA

2025

**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan antara lain untuk mendorong terciptanya Laporan Kinerja sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan terpercaya. Disisi lain laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang didasarkan pada perencanaan strategik yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sungailiat, 22 Januari 2026

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan	13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 3.1 Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran	16
Tabel 3.2 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel 3.3 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	18
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	19
Tabel 3.5 Capaian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
Tabel 3.6 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	21
Tabel 3.7 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	22
Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	23
Tabel 3.9 Capaian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
Tabel 3.10 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	25
Tabel 3.11 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	25
Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	27
Tabel 3.13 Capaian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
Tabel 3.14 Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	28
Tabel 3.15 Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 3.16 Penilaian Hasil Evaluasi AKIP	31
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	33
Tabel 3.18 Capaian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
Tabel 3.19 P a g u Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	37
Tabel 3.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	7

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Reformasi birokrasi telah menjadi isu terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Dalam era reformasi birokrasi ini, perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting yang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ada dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41).

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

- a. Tenaga kerja yang meliputi :
 1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
 - a) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - c) perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 - d) konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
 - e) pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
 2. Penempatan tenaga kerja
 - a) pelayanan antar kerja di Daerah;
 - b) penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah;
 - c) pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
 - d) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purnapenempatan) di Daerah; dan

- e) penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjadalam 1 (satu) Daerah.
3. Hubungan Industrial
- a) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
 - b) bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
 - c) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok
 - d) kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
- b. perindustrian yang meliputi :
- 1. perencanaan pembangunan industri penetapan rencana pembangunan industri.
 - 2. perizinan
 - a) penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) kecil Menengah.
 - b) penerbitan Izin Perluasan Usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; dan
 - c) penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
 - 3. Sistem Informasi Industri Nasional :
 - a. Penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - 1) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Perluasannya;
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dan Izin Perluasannya; dan
 - 3) Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
- c. perdagangan yang meliputi :
- 1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terdiri dari :
 - a) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - b) penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - c) penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.

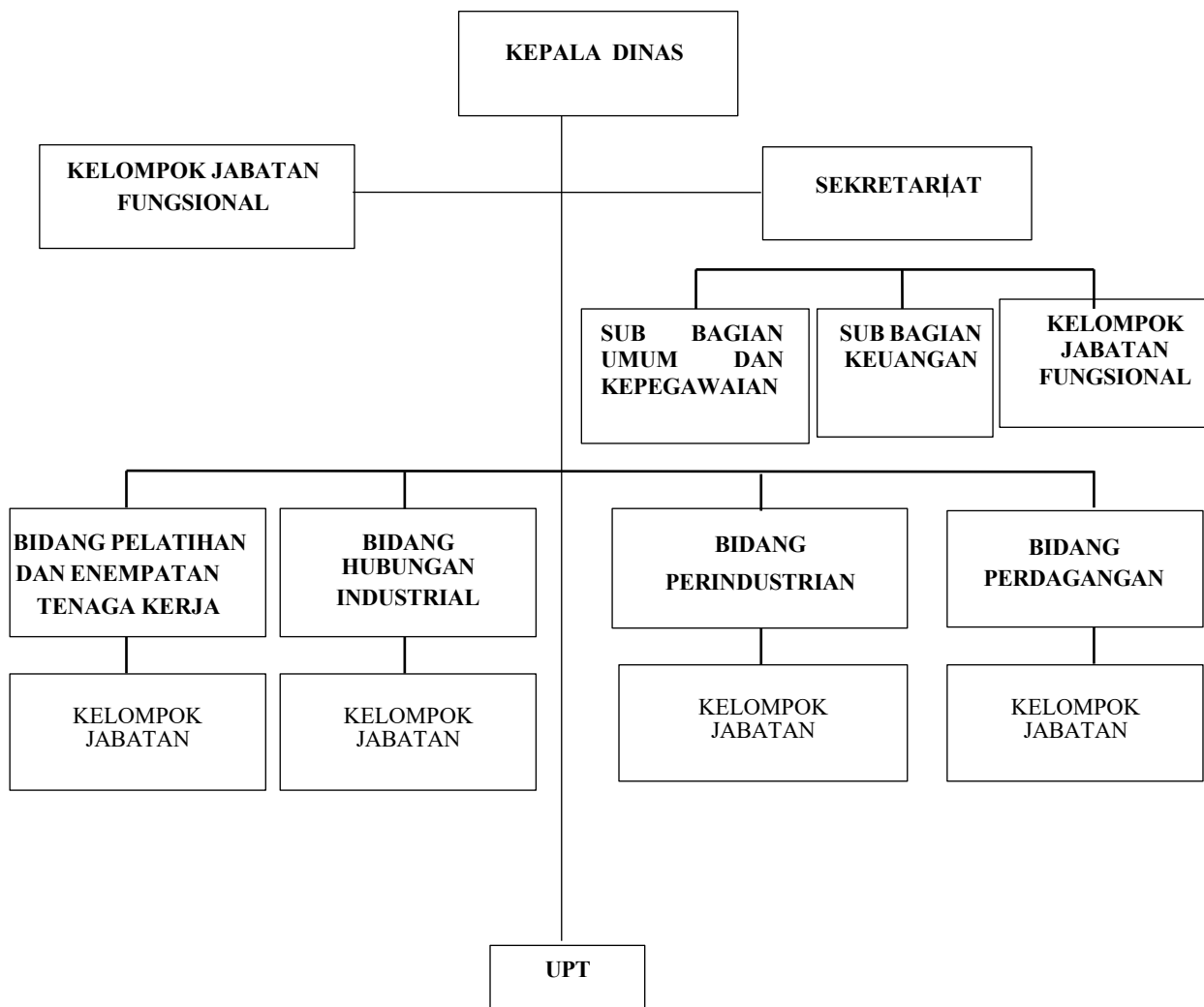
- d) penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - e) pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahanberbahaya di tingkat Daerah;
 - f) rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan
 - g) penerbitan surat keterangan asal.
2. Sarana Distribusi Perdagangan :
- a) pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;dan
 - b) pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting :
- a) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
 - b) pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
 - c) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah; dan
 - d) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor :
- a) Penyelenggaraan promosi melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah; dan
 - b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi.
5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen :
- Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- d. pembinaan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Hubungan Industrial membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Perindustrian membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Perdagangan membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka



Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Pemerintahan Kabupaten Bangka merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir periode Perencanaan Jangka Menengahnya pada tahun 2023 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019-2023. Sebagai implementasi dari Undang-undang 10 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023, maka telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023.

Tahun 2025 merupakan tahun Kedua pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada RPD (Rencana Pembanguna Daerah) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka maka terdapat 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yaitu : Urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Dalam pelaksanaan ketiga urusan dimaksud beberapa isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Rendahnya Kompetensi dan Kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri;
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;
9. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung;

10. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah- tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat;
11. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
12. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk;
13. Belum optimalnya pengembangan promosi hasil produk daerah;
14. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor;
15. Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah;
16. Masih terbatasnya petugas kemetrolgian (tera).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perjanjian kinerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang menjadi indikator pada RPD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	62,20	68,19	74,26
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM	Persentase Laju Pertumbuhan IKM	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,32	24,47	24,62
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,39	12,54	12,69
4.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74,70)	BB (74,75)	BB (74,75)

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengetahui apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besaran capaian target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang menjadi indikator pada RPD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dengan melaksanakan 7 Program. Didalam perjanjian kinerja juga tercantum rencana anggaran untuk setiap programnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	25,30
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,17
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori Nilai	(BB) 76.28

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.245.677.694,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000,00	DAU SG
3.	Hubungan Industrial	90.000.000,00	APBD
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.721.342.000,00	APBD
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	930.500.000,00	APBD + DIF
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	115.000.000,00	APBD
7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.356.500.000,00	APBD + DAK NF
	TOTAL	13.559.019.694,00	

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45	44,45
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	25,30	24,26
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,13	13,10
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	KategoriNilai	BB (76,28)	BB (75,78)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.245.677.694,00	7.364.967.742,00	APBD
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD
3.	Hubungan Industrial	90.000.000,00	39.350.000,00	APBD
4.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.721.342.000,00	1.876.442.450,00	APBD
5.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	930.500.000,00	918.287.680,00	APBD, DIF
6.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	115.000.000,00	191,600.000,00	APBD
7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.356.500.000,00	3.324.000.000,00	APBD, DAK NF
	TOTAL	13.559.019.694,00	13.814.647.872,00	

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketengakerjaan Daerah	Indeks		IPKD = $\frac{\% \text{ Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD} + \% \text{ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} + \% \text{ Pencari Kerja yang ditempatkan} + \% \text{ Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan}}{4}$	Bidang Tenaga kerja dan Bidang Hubungan Industrial
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%		$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%		$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$	BPS
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai		-	Inspektorat

BAB III AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategik, tujuan dari setiap misi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi.

Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik / Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 4 (empat) sasaran yang mencakup 4 (Empat) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 3 sasaran masuk dalam kategori **Sangat baik/ berhasil** dengan 1 Indikator sasaran yang belum ada penilaian.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kedua untuk Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025*

Keberhasilan Sasaran Strategisi diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase kepatuhan peningkatan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan syarat- syarat kerja.

Tabel 3.2
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45	51,48	115,82	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 44,45 indeks dan dapat direalisasikan sebesar 51,48 indeks dengan capaian kinerja 115,82 persen dengan kategori Sangat baik/berhasil.

Hasil dari realisasi tersebut dengan formulasi Program yaitu Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD + Persentase Pencari Kerja yang Kompeten + Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan + Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagkerjaan dibagi 4, dengan rincian Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (60,00%), Persentase Pencari kerja yang Kompeten (56,25%), Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (41,88%) Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (47,77%), data dukung terlampir.

Dibandingkan dengan tahun 2024 dengan target 41,50 dengan realisasi 44,39% dengan capaian 106,96% (realisasi melebihi target) dan capaian tahun 2025 dengan target 44,45% realisasi 51,48% dengan capaian 115,82% mengalami peningkatan dari tahun 2024.

- b. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya,
Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap target renstra
1.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	41,50	44,39	106,96	44,45	51,48	115,82	74,26	69,32

Indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024 dengan target 41,50% dan realisasi 44,39% dan capaian 106,96%. Tahun 2025 target 44,45% realisasi 51,48% capaian 115,82% dan capaian tahun 2025 terhadap target renstra sebesar 69,32%.

Target di perjanjian kinerja tidak sama dengan target di renstra tahun 2025 karena targetnya terlalu tinggi sebesar 68,19 persen sedangkan di tahun 2024 realisasi hanya 44,39 persen sehingga pada tahun 2025 menyesuaikan antar target di tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024 dengan target 44,45.

Jika dibandingkan capaian tahun 2025 terhadap target Renstra belum mencapai target dengan capaian 69,32 persen, realisasi tahun 2025 51,48 dan target akhir Renstra 74,26 persen.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Untuk indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembandingan. Dikarenakan Indikator Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan.
2. Adanya Komitmen perusahaan untuk patuh terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan dan syarat-syarat kerja.

Faktor penyebab kegagalan capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Belum semua perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan dan penempatan Pencaker ke Dinakerperindag.
- b. Keterbatasan Anggaran.

e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.4
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	139.350.000,00	134.422.720,00	96,46	3,54

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 139.350.00,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 134.422.720,00 atau sebesar 96,46 persen. Dengan tingkat efisiensi sebesar 3,54 persen.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

1. Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja.
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten Bangka.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian dari segi anggaran sangat efisien.

f. *Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran "**Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah**" adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian kinerja Program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1.	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten (%)	56,00	56,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)	53,85	53,85	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (orang)	20	20	
2.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	47,77	47,77	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bangka.	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	91,46	91,46	

	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	62,50	62,50	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	16	16	

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Keternagakerjaan Daerah dapat tercapai 100%.

Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Keberhasilan Sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 3.6
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	24,26	25,21	103,92	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas Indikator Sasaran dapat dirumuskan dengan cara membandingkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dengan PDRB berdasarkan harga berlaku. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.519.297.810.000,00 dan PDRB Kabupaten Bangka sebesar Rp. 21.896.443.500.000,00, indikator sasaran ini pada tahun 2025 dengan target 24,26 persen dapat direalisasi 25,21 persen dengan capaian 103,92 persen dengan kategori sangat Baik/Berhasil atau melebihi target.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.7
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap target renstra	
1.	Persentase Sektor Pengolahan PDRB	Kontribusi Industri terhadap	%	24,32	24,24	99,67	24,26	25,21	103,92	24,62	102,40

Indikator sasaran : Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB yaitu Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Tahun 2024 target 24,32 persen realisasi 24,24 persen dengan capaian 99,67 persen. Tahun 2025 target 24,26 persen realisasi 25,21 persen dengan capaian 103,92 persen. Jika dibandingkan antara Capaian tahun 2025 terhadap target Renstra sudah melebihi target, tahun 2025 realisasi 25,21 persen sedangkan target akhir Renstra 24,62 persen dengan capaian 102,40 persen.

- c. *Analisa realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*

Untuk indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembandingan. Dikarenakan Indikator program, kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

- d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Berdasarkan tabel diatas Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 capaian kinerjanya kurang dari target yang telah

ditetapkan tetapi dengan kategori sangat baik/berhasil.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung terhadap pencapaian sasaran dan indikator sasaran “Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB” adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan industri Kabupaten /Kota serta Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Keberhasilan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka dikarenakan mendapatkan anggaran dari Kementerian Perindustrian yaitu Sumber Dana yang berasal dari APBD dan Dak Non Fisik.

Belanja Program ini terdiri dari anggaran yang berasal dari :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan industri Kabupaten /Kota APBD sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi Rp. 44.200.000,00
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat APBD sebesar Rp. 172.500.000,00 dengan realisasi Rp. 168.605.522,00 DAK Non Fisik sebesar Rp. 3.106.500.00,00 dengan realisasi Rp. 2.779.351.233,00.

e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	3.324.000.000,00	2.992.156.755,00	90,02	9,98

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.324.000.000,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 2.992.156.755 atau sebesar 90,02 persen, Dengan tingkat efisiensi sebesar 9,98 persen. Dengan demikian dari segi anggaran efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran "**Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB**" adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian kinerja Program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM (%)	1,5	6,19	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (%)	25	25	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan indsutri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	
	Sub Kegiatan Kooridinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	11	11	

Capaian kinerja Program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dapat tercapai dan program perencanaan dan pembangunan industri melebihi dari target.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB.

Tabel 3.10
Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,10	13,21	100,84	Sangat Baik/Berhasil

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 Indikator Sasaran dapat dirumuskan dengan cara membandingkan Kontribusi Sektor Perdagangan dengan PDRB berdasarkan harga Berlaku. Sedangkan Tahun 2025 target indikator sasaran 13,10 persen dengan realisasi 13,21 persen dan capaian kinerja 100,84 persen dengan kategori Sangat Baik/Berhasil.

b. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.11
Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap target renstra
1.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,15	13,09	99,54	13,10	13,21	100,84	12,69	104,10

Capaian indikator dengan indikator sasaran yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2024 target 13,15 persen realisasi 13,09 persen capaian 99,54 persen tidak mencapai target sedangkan tahun 2025 target 13,10 persen realisasi 13,21 persen dengan capaian 100,84 persen melebihi dari target. Perbandingan Tahun 2025 terhadap target Renstra telah melebihi target target diakhiri Renstra hanya 12,69 persen sedangkan realisasi tahun 2025 sudah 13,21 persen, dengan capaian 104,10 persen.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Untuk indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan pembanding. Dikarenakan Indikator program, kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tidak sama sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi Kinerja dengan standar Nasional.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung terhadap pencapaian sasaran dan indikator sasaran “ Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB” adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan dan Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.

Pada Tahun 2025 Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Kegiatan

Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mendapatkan sumber dana berasal dari Dana Insentif Fiskal untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat di Kabupaten Bangka.

e. *Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	2.986.330.130,00	2.833.095.490,00	94,87	5,13

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.986.330.130,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 2.833.095.490,00 atau sebesar 94,87 persen. Dengan tingkat efisien sebesar 5,13 persen.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang.
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.

Dengan demikian dari segi anggaran efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator sasaran **“Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB”** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian kinerja Program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi (%)	70,00	70,00	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	75,00	75,00	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	5	
2.	Program Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	90,00	90,00	
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting (%)	90,00	90,00	

	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	6	6	
3.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang (%)	39,29	60,16	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang (%)	85,81	110,38	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (UTTP)	1500	1656	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	500	881	

Capaian kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mencapai target 100% dan melebihi target dengan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi legal.

Tahun 2025 UPT Metrologi Legal ada pembelian alat UTTP sehingga mempengaruhi persentase alat standar tera/tera ulang yang dimiliki.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.14

Indikator Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,78	-	-	Belum ada Penilaian dari Inspektorat

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 dengan target nilai 75,78 dan belum adanya penilian dari Inspektorat untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Tahun 2024 dengan target dengan kategori BB nilai (76,26) memperoleh penilaian dari Inspektorat dengan Kategori BB nilai (75,75) tidak mencapai target sebesar (0,51) mengalami penurunan. Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dengan target awal kategori BB (76,28) di Perjanjian Kinerja Perubahan mengalami penurunan dikarenakan tahun 2024 Hasil Evaluasi AKIP untuk Dinakerperindag tidak mencapai target dan turun menjadi Kategori BB (75,78) dan belum ada penilaian dari inspektorat.

- b. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Tabel 3.15

Perbandingan Indikator Sasaran Kondisi Tahun Sebelumnya, Realisasi dan Target Jangka Menengah

No.	Indiaktor Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap target renstra
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	%	76,26	75,75	99,33	75,78	-	-	74,75	-

Tabel 3.16
Penilaian Hasil Evaluasi AKIP

Komponen yang dinilai		Bobot	Tahun	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,35	25,12
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,75	19,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,50	11,25
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,63	19,63
Nilai Hasil Evaluasi			76,23	75,75
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB
Interpretasi			(SANGAT BAIK)	(SANGAT BAIK)

Capaian indikator dengan indikator sasaran yaitu Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 belum ada penilaian dari Inspektorat.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah di Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 Adapun penurunan itu ada pada komponen Perencanaan kinerja di tahun 2023 dengan nilai 25,35 menjadi 25,12 di tahun 2024, Komponen Pelaporan Kinerja juga menurun dari nilai 11,50 di tahun 2023 menjadi 11,25 di tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian AKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut ada 4 komponen yang dinilai Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja.

d. *Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Untuk indikator Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Penilaian Hasil Evaluasi AKIP dimana komponen perencanaan dan pelaporan menurun di tahun 2024 dengan komponen perencanaan nilai 25,12 sedangkan di tahun 2023 dengan nilai 25,35, sedangkan untuk pelaporan di tahun 2024 dengan nilai 11,40 sedangkan di tahun 2025 dengan nilai 11,25 .

Penyebab menurunnya komponen Perencanaan dari Hasil Evaluasi tahun 2024 adalah :

1. Belum tersedianya dokumentasi yang lengkap atas pelaksanaan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala. Dalam proses pemantauan harus menyertakan hasil pemantauan dengan disertai kendala, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pencapaian kinerja pada periode berikutnya
2. Dokumen perencanaan belum diupload di Website resmi perangkat daerah.
3. Dokumen kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja antar fungsi lainnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyebab menurunnya komponen Pelaporan dari Hasil Evaluasi tahun 2024 adalah:

1. Belum tersedianya informasi terkait adanya peran serta seluruh pegawai dalam penyajian informasi dalam laporan kinerja seperti adanya pelaksanaan dialog kinerja yang merupakan bentuk kepedulian seluruh pegawai dalam penyajian informasi dalam laporan kinerja.
2. Belum ada informasi dan data dukung bahwa penyesuaian anggaran (Perubahan anggaran) belum seluruhnya berdasarkan evaluasi kinerja.
3. Laporan kinerja belum secara jelas menyajikan informasi kualitas atas capaian

kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dan hanya menjelaskan sumber daya keuangan, efisiensi sumber daya manusia dan sarana prasarana belum dijelaskan dalam proses pencapaian kinerja,

Tindaklanjut dari hasil Evaluasi AKIP :

1. Sudah dilaksanakan pemantauan rencana aksi pertriwulan dengan adanya Laporan Evaluasi Renja dan Evaluasi Rencana Aksi.
2. Sudah diupload di Web dinakerperindag dan PPID
3. Di Matrik realisasi Kinerja dan anggaran sudah menggambarkan penurunan anggaran dikarenakan ada Refocusing anggaran, tetapi di anggaran Perubahan ada penambahan untuk revitalisasi Pasar Belinyu.
4. Laporan Kinerja sudah sesuai dengan sistematika pelaporan Laporan Kinerja

e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2025	7.381.403.142,00	6.736.526.330,00	91,26	8,74

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program yang mendukung pencapaian sasaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 7.381.403.142,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 6.736.526.330,00 atau sebesar 91,26 persen. Dengan tingkat efisien sebesar 8,74 persen.

Dengan demikian dari segi anggaran efisien.

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator sasaran ini adalah :

Tabel 3.18

Capaian kinerja Program , kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Pembangunan Keternagakerjaan Daerah

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	25,59	Belum ada Penilaian	
		Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,12	Belum ada Penilaian	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	100	
		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	100	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (Dokumen)	13	19	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	19	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	
	Kegiatan Admisntrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	54	54	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	42	42	

		Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah (Indeks)	64,55	Belum ada penilaian	
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap (%)	100	100	
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (%)	100	100	
	Sub Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1	1	
	Sub Kegiatan pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian (Dokumen)	11	11	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4	4	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di Perangkat Daerah (%)	100	100	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik (%)	100	100	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara (%)	65,00	65,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	3 Mobil dan 13	3 Mobil dan 13	

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Motor	Motor	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	

B. Realisasi Anggaran

Belanja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 13.831.083.272,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.696.201.295,00 atau 91,79% sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pagu anggaran Rp. 4.727.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.119.426.701 atau 108,30% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Anggaran	%	Fisik (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.381.403.142,00	6.736.526.330,00		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.439.000,00	17.386.869,00	99,70	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.012.500,00	16.012.500,00	100,00	100
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.139.294.815,00	5.746.918.332,00	93,61	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.745.500,00	13.715.500,00	99,78	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.655.000,00	96,55	100
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.670.000,00	99,18	100
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.410.800,00	12.570.576,00	76,60	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.330.000,00	42.271.300,00	99,86	100
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.410.800,00	16.410.768,00	100,00	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.310.800,00	76.157.762,00	97,25	100

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Anggaran	%	Fisik (%)
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.340.000,00	8.340.000,00	100,00	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	505.563.300,00	485.055.330,00	95,94	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.314.057,00	208.488.588,00	48,34	100
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.481.570,00	73.873.805,00	96,59	100
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100.000.000,00	95.772.720,00		
	Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit kompetensi	Sub Kegiatan proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	100.000.000,00	95.772.720,00	95,77	100
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		39.350.000,00	38.650.000,00		
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	15.450.000,00	15.120.000,00	97,86	100
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	23.900.000,00	23.530.000,00	98,45	100
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.876.442.450,00	1.730.193.873,00		
	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.876.442.450,00	1.730.193.873,00	92,21	100

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Anggaran	%	Fisik (%)
5.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		918.287.680,00	912.890.000,00		
	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	27.987.680,00	27.600.000,00	98,61	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	890.300.000,00	885.290.000,00	99,44	100
6.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		191.600.000,00	190.011.617,00		
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	181.600.000,00	180.336.617,00	99,30	100
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000,00	9.675.000,00	96,75	100
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3.324.000.000,00	2.992.156.755,00		
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.200.000,00	98,22	100
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3.279.000.000,00	2.947.956.755,00	89,90	100
JUMLAH			13.831.083.272,00	12.696.201.295,00	91,79	

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PENDAPATAN	4.727.270.000,00	5.119.426.701,00	108,30
1.	Retribusi Kios	1.069.752.000,00	1.275.834.900,00	119,26
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.587.518.000,00	1.705.810.000,00	107,45
3.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkit Diluar Badan Jalan	1.870.000.000,00	1.900.483.000,00	101,63
4.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.00000	237.298.801,00	118,65

Dari data capaian kinerja Dinakerperindag program, Kegiatan dan Sub Kegiatan rata-rata mencapai 100 persen ada juga yang melebihi target, Capaian kinerja dan dapat dilihat pada lampiran Matrik Data Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik/Berhasil.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 dan implementasi Rencana Strategis 2024-2026, untuk tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mencakup 7 program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dalam mendukung 4 (empat) sasaran strategis dengan total alokasi dan Rp. 13.831.083.272,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.696.201.295,00 atau 91,79% sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pagu anggaran Rp. 4.727.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.119.426.701 atau 108,30%.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja OPD dalam upaya guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sungailiat, 22 Januari 2026

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

LAMPIRAN



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ASEP SETIAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISNAINI
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



ISNAINI

Sungailist, 20 Januari 2025
PIHAK PERTAMA



PEMINTA KINERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670561194031013
BANGKA

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
TAHUN ANGGARAN : **2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	25,30
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,17
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (76,28)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.245.677.694	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000	DAU SG
3	Program Hubungan Industrial	90.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.721.342.000	APBD
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	930.500.000	APBD+DIF
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	115.000.000	APBD
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.356.500.000	APBD + DAK NON FISIK
	TOTAL	13.559.019.694	

PIHAK KEDUA



ISNAINI

Sungailiat, 20 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



Drs. H. ASEP SETIAWAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 N.P.N. 670504 199403 1 013



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. ASEP SETIAWAN
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERY INSANI
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



FERY INSANI

Sungailiat, 07 November 2025
PIHAK PERTAMA



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45	44,45
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	25,30	24,26
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,13	13,10
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (76,28)	BB (75,78)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.245.677.694	7.364.967.742	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000	100.000.000	APBD
3	Program Hubungan Industrial	90.000.000	39.350.000	APBD
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.721.342.000	1.876.442.450	APBD
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	930.500.000	918.287.680	APBD, IF
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	115.000.000	191.600.000	APBD
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.356.500.000	3.324.000.000	APBD, DAK NF
	TOTAL	13.559.019.694	13.814.647.872	

PIHAK KEDUA



FERY INSANI

Sungailiat, 07 November 2025
 PIHAK PERTAMA



H. ASEP SETIAWAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670504 199403 1 013

Tabel 12.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangka (miliar rupiah), 2021–2025
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bangka Regency (billion ruplahs), 2021–2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3.306,36	3.586,53	3.926,66	4.242,27	4.634,49
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.712,66	1.694,53	1.582,41	1.634,64	1.890,42
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.908,20	4.658,66	4.902,10	4.881,34	5.519,30
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	41,85	40,85	41,38	43,82	47,04
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,76	3,95	4,36	4,82	5,07
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.548,53	1.633,46	1.830,95	1.836,98	1.834,59
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.989,71	2.361,41	2.534,60	2.617,50	2.893,02
H Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	358,62	412,64	483,69	519,13	565,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	461,49	531,93	601,38	641,43	709,89
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	370,68	410,95	472,73	524,59	571,63

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	398,58	466,62	554,84	561,80	577,05
L	Real Estat/Real Estate Activities	557,56	601,25	647,42	677,14	708,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	38,05	44,43	52,02	55,63	61,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	813,86	806,92	857,03	921,32	922,73
P	Jasa Pendidikan/Education	358,86	382,50	433,56	487,78	531,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	176,63	184,43	204,65	211,02	228,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	120,61	135,22	154,82	173,76	195,33
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		16.166,01	17.956,28	19.284,60	20.034,99	21.896,44

Catatan/Notes: *Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

**REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	33,37	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (75,78)	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	25,59	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	11,12	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD</i>	<i>Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
			<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	13	19	146,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	19	105,56

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	0,00
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	54	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Laporan	42	42	100,00
		Meningkatnya Kualitas Asn Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks	64,55	Belum ada Penilaian	Belum ada Penilaian
	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	Persen	100	100	100,00
		Meningkatnya Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
	Sub Kegiatan pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Dokumen	11	11	100,00
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	4	4	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa adminstrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di Perngkat Daerah	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Layanan jasa penunjang Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	100,00
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang dipelihara</i>	<i>Persen</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua	3 mobil dan 13 motor	3 mobil dan 13 motor	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100,00
		Menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,17	4,75	91,88
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,45	51,48	115,82
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	Persen	56,00	56,00	100,00
	<i>Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit kompetensi</i>	<i>Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja</i>	<i>Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan</i>	<i>Persen</i>	<i>53,85</i>	<i>53,85</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	20	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Persen	47,77	47,77	100,00
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan</i>	<i>Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</i>	<i>Persen</i>	<i>91,46</i>	<i>91,46</i>	<i>100</i>
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Terseleenggaranya Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upa, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	20	20	100,00
	<i>Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota</i>	<i>Terselesainya penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama</i>	<i>Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</i>	<i>Persen</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	16	16	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Laju pertumbuhan sektor Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Peren	7,77	5,37	69,11
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,10	13,21	100,84
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi	Persen	70,00	70,00	100,00
	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persen</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	5	5	100,00
5.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	Persen	90,00	90,00	100,00
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota</i>	<i>Meningkatnya Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota</i>	<i>Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting</i>	<i>Persen</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Tersedianya laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Baran Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6	6	100,00
6.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	39,29	60,16	153,12
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	<i>Meningkatnya UTTP yang ditera/tera Ulang</i>	<i>Persentase UTTP yang ditera/tera ulang</i>	<i>Persen</i>	<i>85,81</i>	<i>110,38</i>	<i>128,63</i>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat ukur, Alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	1500	1656	110,40
	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	881	176,20
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor IKM	Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	Persen	12,69	7,24	57,05
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	24,26	25,21	103,92
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persen	1,5	6,19	412,67
	<i>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Persen</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100,00

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Indutri dan peran Serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	11	11	100,00
--	--	---	---	---------	----	----	--------